

**PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*  
DAN JUMLAH SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**  
(Studi Pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh :**

**BAITUL JANNAH G PUTRI**

**NPM : 1551030014**

**Program Studi : Ekonomi Syariah (KAS)**

**Pembimbing I**

**: Prof. Dr. Suharto, S.H., M.A.**

**Pembimbing II**

**: Agus Kurniawan, M.S.Ak.**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*  
DAN JUMLAH SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**  
(Studi Pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah)

**Skripsi**

**BAITUL JANNAH G PUTRI  
NPM : 1551030014**



**Program Studi : Ekonomi Syariah (KAS)**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Berdasarkan data LKPD yang dipublikasikan oleh BPK, pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah memang mengalami peningkatan dan penurunan selama kurun waktu dua tahun terakhir (tahun 2012-2013). Meskipun demikian dalam kurun waktu dua tahun terakhir terjadi trend peningkatan dalam hal pengungkapan laporan keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *intergovernmental revenue* dan jumlah SKPD atau satuan kerja perangkat daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis linier berganda dan uji hipotesis menggunakan Program SPSS. Jumlah data yang terkumpul di penelitian ini terdiri dari 35 sampel dengan menggunakan *sampel jenuh* diperoleh 35 data sebagai sampel dari 2 tahun pengamatan yakni 2012-2013. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *intergovernmental revenue* dan jumlah SKPD atau satuan kerja perangkat daerah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi secara parsial *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh sedangkan jumlah SKPD atau satuan kerja perangkat daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci :** *Intergovernmental Revenue*, jumlah SKPD dan tingkat pengungkapan

## ABSTRACT

Based on LKPD data published by BPK, the disclosure of local government financial reports has indeed increased and decreased over the past two years (2012-2013). Nevertheless, in the last two years there has been an increasing trend in terms of disclosing regional financial reports.

This research aims to determine and analyze the effect of intergovernmental revenue and the number of SKPD or regional work units on the level of disclosure of local government financial reports.

The research method in this thesis is descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear analysis and hypothesis testing using the SPSS program. The amount of data collected in this study consisted of 35 samples using saturated samples, 35 data were obtained as samples from 2 years of observation, namely 2012-2013. The type of data used is secondary data.

The results of this study prove that intergovernmental revenue and the number of SKPD or regional work units simultaneously or jointly have a positive effect on the level of disclosure of local government financial reports. Intergovernmental revenue and the number of SKPD or regional work units partially have no effect on the level of disclosure of local government financial reports.

**Key Words :** *Intergovernmental Revenue*, the number of SKPD and disclosure

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Baitul Jannah G Putri  
NPM : 1551030014  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

menyatakan skripsi yang berjudul Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Dan Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2022  
Penulis,



**Baitul Jannah G Putri**  
**NPM. 1551030014**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Dan Jumlah SKPD Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah 2012-2013)

Nama : Baitul Jannah G Putri  
NPM : 155103010014  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidangmunoqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

Prof. Dr. Suharto, S.H., M.A.  
NIP. 195304231980031003

**Pembimbing II**

Agus Kurniawan, M.S.Ak.  
NIP. 2014080919761226103

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy  
NIP. 198208082011022009



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Pengaruh Intergovernmental Revenue dan Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam** (Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah) yang disusun oleh: **Baitul Jannah G Putri, NPM. 1551030014** Program Studi **Ekonomi Syariah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Pada hari/tanggal: Rabu/28 Desember 2022.

TIM MUNAQASYAH

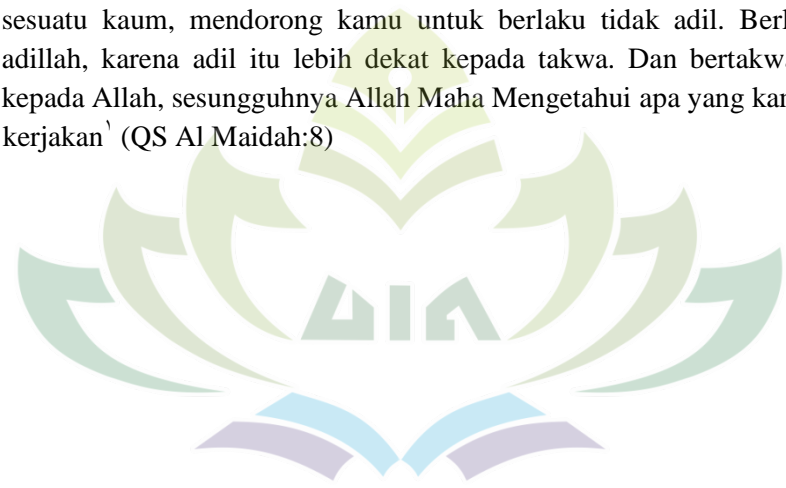
Ketua : Ahmad Zuliansyah, M.M. (.....)  
Sekretaris : Nur Wahyu N., M.S.Ak.Akt. (.....)  
Penguji Utama : Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I. (.....)  
Penguji Pendamping I : Prof. Dr. Suharto, S.H., M.A. (.....)  
Penguji Pendamping II : Agus Kurniawan, M.S.Ak (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
  
Dr. Agus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA  
NIP. 1962060100926 200801 1008

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan` (QS Al Maidah:8)



---

<sup>1</sup> Fatwa Cemani Solo, Al-Maidah/5.8.



## PERSEMBAHAN

Segala puji kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan anugrah yang selama ini telah diberikan kepada saya dan saudara – saudara muslim saya. Dalam mengerjakan skripsi ini bukanlah tugas yang berat bagi penulis untuk dipelajari dalam hidup ini, karena masih banyak tugas yang lebih berat di masa yang akan mendatang. Puji syukur juga penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga membawa umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan ikhlas dan tulus penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang kemudian skripsi ini penulis persembahkan kepada :

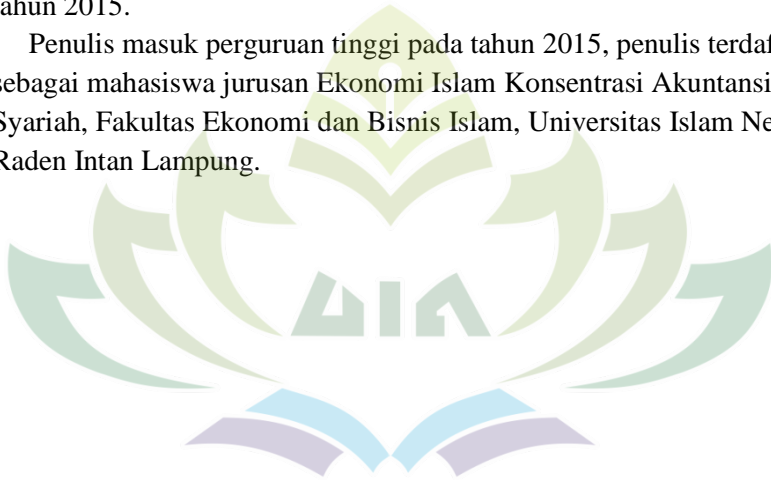
1. Kedua orang tuaku Bpk. Purwadi dan Ibu Widiyanti, Ibu Rusiyati, suami tercinta Benny S.Si dan anak terkasih Beevi Aneisha Gantari yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat penuh cinta yang tak terbalas sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Bapak dan Ibu dosen serta staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan banyak ilmu bagi penulis selama di perkuliahan. Semoga Allah membalas semua kebaikan.
3. Almamaterku tercinta, UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Banjarnegara Jawa Tengah tepatnya pada tanggal 20 September 1997, merupakan anak tunggal Bapak Purwadi dan Ibu Widiyanti yang menjadi panutan dan pembimbing hidup saya sebagai penulis penelitian ini sendiri.

Pendidikan formal penulis yang ditempuh pada taman kanak-kanak RA Cokroaminoto Luwung. Setelah tamat penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar di MI Cokroaminoto Luwung, usai menempuh pendidikan sekolah dasar penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP N 1 Wanadadi, dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMKN 1 Bawang lulus pada tahun 2015.

Penulis masuk perguruan tinggi pada tahun 2015, penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Konsentrasi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirobil alaamiin*, Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpah taufik serta hidayah-NYA berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Dan Jumlah Skpd Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah 2012-2013)”**. *Shalawat* serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para umat yang senantiasa istiqomah berada dijalan-NYA. Skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci saya ungkapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E.,M.M.,Akt.,CA. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Suharto, S.H., M.A. selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan yang berarti selama penulisan skripsi ini dan selama proses pencapaian akademik.
3. Bapak Agus Kurniawan, M.S.Ak. selaku pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dan usulan perbaikan dalam penulisan ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan nasihat.
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan baik dalam mendapatkan informasi, sumber referensi, data dan lain-lain.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan dalam menulis skripsi. Pada Akhirnya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, Semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya.



Bandar Lampung, Desember 2022  
Penulis,

Baitul Jannah G Putri  
NPM.1551030014

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang .....	4
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Stewardship .....	11
B. Teori Kepatuhan .....	13
C. Teori Standar Akuntansi Pemerintah .....	15
D. Teori Pengungkapan LKPD .....	17
E. Tinjauan Pustaka .....	19
F. Peneliti Terdahulu .....	20
G. Kerangka Berfikir .....	24
H. Hipotesis .....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	29
B. Sumber Data .....	30
C. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian.....	30
D. Populasi dan Sampel .....	34
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Metode Analisis Data.....	36

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

A. Penyajian Data .....	43
1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	43
2. Analisis Deskriptif .....	44
3. Hasil Uji Analisis .....	46
4. Hasil Uji Hipotesis .....	50
B. Analisis Data.....	52
1. Pengaruh Intergovernmental Revenue Terhadap Tingkat Pengungkapan .....	52
2. Pengaruh Jumlah SKPD Terhadap Tingkat Pengungkapan .....	54

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	31
3.2 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi .....	39
4.1 Tahapan Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria .....	44
4.2 Statistik Deskriptif.....	45
4.3 Uji Normalitas .....	46
4.4 Multikolinearitas .....	47
4.5 Autokorelasi .....	49
4.6 Regresi Linear Berganda .....	49
4.7 Hasil Koefisien Determinasi.....	51
4.8 Hasil Uji F.....	51
4.9 Hasil Uji t.....	52



## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran dalam Penelitian.....	25
4.1 Heteroskedastisitas .....	48





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Item Pengungkapan Wajib .....	61
Lampiran 2 Sampel Penelitian Pemerintah Kabupaten Kota .....	64
Lampiran 3 Hasil Uji.....	68



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam memahami judul penelitian yang penulis buat dan tidak menimbulkan kesalah pahaman oleh para pembaca maka perlu adanya penguraian arti dari setiap istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Penelitian ini berjudul “**Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Dan Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah)**”. Dengan adanya penegasan judul tersebut diharapkan tidak adanya diisenterpretasi terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, selain itu tujuan dari penegasan judul ini adalah sebagai proses penekanan permasalahan pokok yang akan dibahas.

Uraian dari judul penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. “**Pengaruh**” adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membenrtuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang.<sup>1</sup>
2. “***Intergovernmental revenue***” adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali, *Intergovernmental revenue* lebih dikenal dengan istilah dana perimbangan. Menurut UU No 33 Tahun 2004 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah dalam rangka

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 77.

mendanai kebutuhan daerah sebagai implementasi pelaksanaan asas desentralisasi.<sup>2</sup>

3. **“SKPD”** atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu entitas pelaporan dalam lingkungan Pemerintah Daerah merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.<sup>3</sup>
4. **“Pengungkapan”** memiliki arti tidak menutupi atau menyembunyikan, jika dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus mampu memberikan informasi dan penjelasan yang cukup terkait dengan aktivitas dari suatu unit usaha.<sup>4</sup>
5. **“Laporan Keuangan”** adalah laporan yang disusun untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama pihak-pihak yang berada diluar instansi pemerintahana sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, pelaksanaan tugas, fungsi program dan aktivitas, serta bentuk penilaian terhadap akuntabilitas dan pembuatan keputusan baik keputusan yang terkait dengan ekonomi, sosial, maupun politik.<sup>5</sup>
6. **“Perspektif”** adalah sudut pandang atau pandangan.<sup>6</sup>
7. **“Ekonomi Islam”** adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan sumber daya

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Dana Perimbangan. .

<sup>3</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

<sup>4</sup>Chariri dan Ghazali dalam Febrianto Nova, *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Ukuran Legislatif, dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2, no.4 (2018), 235.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia.*, 1011.

agar mencapai falah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya dana perimbangan dan jumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terhadap informasi dan penjelasan yang ada dalam laporan keuangan pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2013 dalam sudut pandang ekonomi Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi peneliti untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan transparansi dana akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan. Pada LKPD Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dari 35 Kabupaten/Kota yang ada pada tahun 2013 sebanyak 11 Kabupaten/Kota memperoleh opini WTP, sisanya sebanyak 24 Kabupaten/Kota memperoleh opini WDP.<sup>8</sup>

Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan tetapi hanya satu dimana pada tahun 2012 terdapat 10 LKPD yang berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan opini WTP.<sup>9</sup> Ini tentu menjadi bukti khususnya berkaitan dengan kurangnya kualitas LKPD dan harus adanya perbaikan dari entitas

---

<sup>7</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. 2007), 19.

<sup>8</sup>Bpk.go.id (Laporan LKPD tersedia online, diakses pada 15 Oktober 2019)

<sup>9</sup>*Ibid.*

yang ada di lingkungan pemerintah baik Pemkab ataupun Pemkot.

Terdapat berbagai faktor yang berpengaruh kepada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya adalah jumlah SKPD. Meskipun telah banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai hal tersebut, namun penggunaan *intergovernmental revenue* dan jumlah SKPD sebagai variabel dependen masih belum banyak dilakukan terlebih lagi dikaitkan dengan pandangan sistem Ekonomi Islam, oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pengaruh *intergovernmental revenue* dan jumlah SKPD terhadap pengungkapan laporan keuangan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2013

## **2. Alasan Subjektif**

Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **C. Latar Belakang**

Pengelolaan kinerja pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi ataupun pada tingkat Kabupaten/Kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU Nomor 33 tahun 2011 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 telah memberikan kewenangan secara penuh kepada pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara lebih luas, nyata dan bertanggung jawab baik dalam lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot).

Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peranan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu memacu masing-masing daerah untuk dapat memiliki penghasilan yang cukup dalam upaya memenuhi kebutuhan

daerah. Sehingga setiap daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

*Intergovernmental revenue* merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dimana dana ini merupakan dana dari pusat yang dikhususkan untuk membiayai program-program pemerintah daerah. *Intergovernmental revenue* atau dana perimbangan memiliki kontribusi besar terhadap APBD. Jika pengelolaannya dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan maka akan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan transparansi dana akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah laporan yang disusun untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama pihak-pihak yang berada diluar instansi pemerintahana sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, pelaksanaan tugas, fungsi program dan aktivitas, serta bentuk penilaian terhadap akuntabilitas dan pembuatan keputusan baik keputusan yang terkait dengan ekonomi, sosial, maupun politik.<sup>10</sup>

Laporan keuangan pemerintah daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah (Kepala Daerah, Kepala Birokrasi, Bagian Keuangan serta Kepala Dinas), pihak legislatif, para kreditur dan juga masyarakat luas. Adapun secara umum tujuan dari adanya laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan juga kinerja keuangan suatu entitas sehingga dengan

---

<sup>10</sup>Sukmaningrum dalam Febrianto Nova, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Ukuran Legislatif, dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 2, no.4, (2018) : 12.

adanya pelaporan tersebut maka dapat memberikan manfaat bagi para pengguna dalam membuat evaluasi dan keputusan mengenai sumber alokasi dana.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan sektor pemerintahan, pengungkapan laporan keuangan wajib mengacu pada pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan pada bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP, lampiran 1, par. 35-40) menjelaskan bahwa agar keberadaan laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya maka, diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan yang meliputi: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.<sup>12</sup> Laporan keuangan juga menakup mengenai kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Salah satu hal yang berpengaruh dalam tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah adalah jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu entitas pelaporan dalam lingkungan Pemerintah Daerah merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.<sup>13</sup> Sehingga berdasarkan definisi tersebut maka yang dimaksud dengan entitas akuntansi adalah SKPD.

Menurut Mandasari dalam Arifin Iman dan Fitriasari, semakin banyaknya diferensiasi fungsional dalam pemerintah

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Chariri dan Ghazali dalam Febrianto Nova, *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Ukuran Legislatif, dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2, no.4 (2018), 235.

<sup>13</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

daerah maka akan semakin banyak ide, informasi serta inovasi yang berkaitan dengan pengungkapan.<sup>14</sup> Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dilogikakan bahwa semakin banyak jumlah SKPD pada pemerintah daerah maka akan semakin besar pemenuhan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan data LKPD yang dipublikasikan oleh BPK, pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah memang mengalami peningkatan dan penurunan selama kurun waktu dua tahun terakhir (tahun 2012-2013). Meskipun demikian dalam kurun waktu dua tahun terakhir terjadi trend peningkatan dalam hal pengungkapan laporan keuangan daerah. Peningkatan ini ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas LKPD dari sebelumnya memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), persentase LKPD yang memperoleh opini WDP 59.35% turun menjadi 45,64%.<sup>15</sup>

Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada LKPD Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data terjadi peningkatan tetapi hanya satu dimana pada tahun 2012 terdapat 10 LKPD yang berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan opini WTP.<sup>16</sup> Sedangkan pada tahun 2013 terdapat 11 LKPD yang berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan opini WTP. Ini tentu menjadi bukti khususnya berkaitan dengan kurangnya kualitas LKPD dan harus adanya perbaikan dari entitas yang ada di lingkungan pemerintah baik Pemkab ataupun Pemkot.

Pengungkapan laporan keuangan juga merupakan salah satu bentuk dan upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh masyarakat.

---

<sup>14</sup>Arifin, Imam dan Fitriyani, *Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian dan lembaga, Karakteristik Organisasi dan Hasil Audit BPK* (Mataram: Preceeding SNA 17, 2014), 24-27.

<sup>15</sup>Bpk.go.id (Laporan LKPD tersedia online, diakses pada 15 Oktober 2019).

<sup>16</sup>*Ibid.*



Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ  
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS Al-Anfal:27)*

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

﴿ اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا اِلَآءَ مَنْتَ اِلَىٰ اَهْلِهَا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” (QS. An Nisa’: 58)*

Dalam haditsnya Rasulullah SAW pun bersabda :

اَدَّ الْاٰمَانَةَ اِلَىٰ مَنْ اٰتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*“Tunaikanlah amanat kepada orang yang menitipkan amanat padamu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR. Abu Daud no. 3535 dan At Tirmidzi no. 1624, hasan shahih)*

Berkaitan dengan pembahasan ini maka amanat yang dimaksud adalah amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menjalankan roda pemerintahan daerah tersebut termasuk didalamnya berkaitan dengan pengungkapan laporan keuangan.

Berangkat dari realita tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pengaruh intergovernmental revenue dan jumlah SKPD terhadap pengungkapan laporan keuangan pada Kabupaten/Kota se-

Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013 dalam skripsi yang berjudul "**PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE* DAN JUMLAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** (Studi Pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Provinsi Jawa Tengah)"

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah jumlah SKPD berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh *Intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengetahui pengaruh jumlah SKPD terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Diharapkan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai adanya pengaruh *Intergovernmental*

*revenue* dan jumlah SKPD terhadap pengungkapan laporan keuangan.

- b) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam tentang pengaruh *Intergovernmental revenue* dan jumlah SKPD terhadap pengungkapan laporan keuangan.

## 2. Manfaat praktis

- a) Bagi pemerintah pusat, memberikan gambaran mengenai kondisi yang dapat mempengaruhi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota terutama berkaitan dengan pengungkapan laporan keuangan sehingga dapat menjadi landasan dalam mengevaluasi keputusan yang akan diambil.
- b) Bagi pihak Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai input atau masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga lebih efektif dalam mengelola dan mengungkapkan laporan keuangannya.
- c) Bagi jurusan, penelitian ini dapat menambah koleksi tentang kajian pengaruh *Intergovernmental revenue* dan jumlah SKPD terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota.
- d) Bagi akademik, dapat menambah wawasan, informasi dan pengetahuan tentang pengaruh *Intergovernmental revenue* dan jumlah SKPD terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Intergovernmental Revenue* dan jumlah SKPD secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. *Intergovernmental Revenue* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang berarti bahwa besaran dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan karena pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah lain seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lain yang lebih mendukung aktivitas dan kebutuhan pemerintah daerah sehingga dana transfer dari pemerintah pusat hanya sebagai tambahan dana pendukung aktivitas dan kebutuhan pemerintah daerah.
2. Jumlah SKPD secara parsial berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Jumlah SKPD yang berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan pemerintah provinsi yang memiliki SKPD banyak cenderung melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin kompleks suatu pemerintahan dalam menjalankan kegiatan akan menyebabkan semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan. Semakin kompleks pemerintahan dibutuhkan pengungkapan yang lebih besar untuk membantu pembaca

laporan keuangan memahami kompleksitas kegiatan yang dilakukan pemerintah. Rata-rata tingkat pengungkapan LKPD di provinsi Jawa Tengah sebesar 64%, yaitu rata-rata daerah hanya mengungkapkan sebanyak 34 item dari total item yang harus diungkapkan sebanyak 53 item.

## B. Saran

1. *Intergovernmental Revenue* dan jumlah SKPD merupakan dua dari banyak aspek-aspek yang merupakan satu kesatuan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan lagi aspek-aspek penting agar mampu memberikan tingkat pengungkapan yang lebih tinggi sehingga transparansi dan akuntabilitas senantiasa terjaga
2. Untuk peneliti selanjutnya mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan sehingga dapat dilihat adanya tingkat pengungkapan dengan sudut pandang yang berbeda serta melakukan penelitian pada daerah/Provinsi lain atau dengan menambah variabel lain untuk membuktikan konsistensi hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Imam dan Fitriasari, *Pengungkapan Laporan Keuangan Kementrian dan lembaga, Karakteristik Organisasi dan Hasil Audit BPK*, Mataram: Preceeding SNA 17, 2014.
- Bpk.go.id (Laporan LKPD tersedia online, diakses pada 15 Oktober 2019).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010. Cet.5.
- Febrianto, Nova, *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Ukuran Legislatif, dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vol. 2 Nomor 4 tahun 2018.
- Iqbal, Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta : Bumi Akasara, 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Suhardjanto, Djoko dan Yulianingtyas, *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 8 No. 1 , 2011.
- Suharsimi Arikunto.(2007). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik..* Jakarta: Bhineka Cipta.Cet.VII.

Sumarjo hendro dalam Hendri Atapson V Girsang dan Etna Nur Afri, *Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012)*, Diponegoro Jurnal of Accounting Volume 4 Nomor 4 2015

Susiadi, (2015). *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Dana Perimbangan.

Putu Riesty Masdiantini dan Made Adi Ernawati, Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan dan Opini Audit BPK pada kinerja Keuangan, 2016

Azis, Al-Qadar, Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan belanja Modal terhadap Kinerja keuangan Pemerintah kabupaten Bone Bolango, 2014

Setyowati , Lilis, *Determinan yang Mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 2016

Amiruddin Zul Himi dan Dwi Martani, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*, 2010

Ratnasari, *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah*, 2016